



Faktor-faktor Kebijakan Myanmar Memilih Norwegia dalam Upaya Penyelesaian Konflik Etnik

Itsnaini Dewayanti

Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Ethnic conflict is one of the main problems faced by Myanmar for years till nowadays. Solving the ethnic conflict, the Myanmar Government have arranged Nationwide Ceasefire Agreement (NCA). Yet, NCA is not effective because the violence still involves in some conflicts. To face and solve the ethnic conflict Myanmar Government decided another rational policy, which is asking the Norway Government to help solve and face the conflict and did not asking to other countries, such as China and India. Norway Government welcomed the request from Myanmar Government for cooperation activity Government of Norway made the policy called Myanmar Peace Support Initiative (MPSI). The purpose of this research is to analyse the reason of Myanmar Government asked Norway to help solve and face the conflict that still ongoing and did not choosing Myanmar's neighbours, which are China and India. Besides that, this research will explain about the way Norway help to face and solve the ethnic conflict through MPSI. This research using rational choice theory and concept of national interest. Methodology on this research are literature study and internet basis. The result of this research is Myanmar chose Norway due to Norway's assistance more supportive towards settlement of ethnic conflict in Myanmar than China and India.

Keywords: Myanmar, Norway, MPSI, ethnic conflict, and rational choice.

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Myanmar adalah konflik etnik. Konflik-konflik etnik yang terjadi di Myanmar disebabkan oleh gerakan yang memperjuangkan untuk mencapai akuntabilitas serta demokrasi yang lebih baik dan konflik yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan kelompok-kelompok oposisi kebangsaan etnis (Burma Link, 2014). Konflik-konflik etnik yang ada di Myanmar juga didorong oleh adanya kebijakan *Burmanization* pada tahun 1962.

Kebijakan *Burmanization* adalah kebijakan pemerintah Myanmar yang lebih mementingkan etnik Burman dan mengabaikan etnik-etnik yang lainnya baik dalam hal politik dan ekonomi (Smith, 1994). Tujuan awal pemerintah Myanmar membuat kebijakan *Burmanization* adalah untuk mengurangi pengaruh dan kehadiran Barat yang mana pengaruh serta kehadiran Barat tersebut sesuai dengan hubungan budaya dan ekonomi Myanmar dengan dunia komunis (Holmes, 1967). Faktor lainnya yang mendorong adanya kebijakan *Burmanization* adalah adanya xenofobia dari anggota-anggota nasionalis dari Dewan Revolusi Burma yang ingin menghilangkan sisa-sisa pengaruh budaya dan ekonomi asing dan memulai proses Burmanisasi dan adanya antagonisme terhadap Amerika Serikat yang menuduh Amerika Serikat mendukung pasukan Komintang (KMT) di Myanmar (Holmes, 1967).

Kebijakan Burmanisasi ini mulai dilancarkan oleh pemerintah Myanmar pada Maret 1962 dengan cara menangkap Perdana Menteri U Nu, pemimpin-pemimpin partai politik, gerakan-gerakan separatis, dan membubarkan parlemen dari U Nu (Holmes, 1967).

Akibat dari kebijakan *Burmanization* tersebut memunculkan konflik-konflik etnik yang ada di Myanmar dan beberapa konflik etnik tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Konflik-konflik tersebut adalah konflik Rakhine, konflik Kachin, konflik Kayin, konflik Kayah, dan konflik Shan. Untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut, pemerintah Myanmar telah melakukan berbagai cara salah satunya dengan melakukan *ceasefire* dengan berbagai organisasi-organisasi yang mewakili kelompok-kelompok serta kepentingan etnik mereka masing-masing. Tetapi dengan dilakukannya *ceasefire* antara pemerintah Myanmar dengan *ethnic armed groups* kekerasan masih terjadi. Seperti konflik di Karen pada 31 Agustus dan 1 September terjadi kekerasan terhadap warga Karen yang dilakukan oleh militer Myanmar yang menyebabkan 200 warga Karen mengungsi seperti yang diungkapkan oleh *Free Burma Rangers* bahwa “*Burma Army’s continued occupation, troop reinforcement and aggressive actions against civilians, in clear violation of the National Ceasefire Agreement, is preventing displaced villagers still in hiding from receiving aid.*” (Karen News, 2018). Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah Myanmar telah melanggar *Nationwide Ceasefire Agreement*, yang berisi tentang *protection of civilians*: “*The Tatmadaw and the Ethnic Armed Organizations shall abide by the following provisions regarding the protection of civilians: (a) Provide necessary support in coordination with each other to improve livelihoods, health, education, and regional development for the people, (b) Avoid acts violating a person’s dignity, violence, extrajudicial detention, kidnapping, torture, inhumane treatment, imprisonment, killing or otherwise causing the disappearance of the individual.*”

Selain melakukan upaya dengan melakukan *ceasefire agreement* yang berulang kali telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terutama *Tatmadaw*, pemerintah Myanmar juga melakukan upaya dengan cara meminta bantuan pemerintah Norwegia untuk membantu mereka dalam menyelesaikan konflik-konflik etnik yang masih berlangsung di Myanmar serta membantu dalam memberikan dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan terhadap orang-orang yang terkena dampak dari konflik.

Norwegia dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada Myanmar untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik-konflik etnik yang masih berlangsung di Myanmar. Hal tersebut dikarenakan adanya permintaan dari pemerintah Myanmar pada tahun 2012 yang meminta kepada pemerintah Norwegia untuk membantu pemerintah Myanmar dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik etnik yang ada di Myanmar (The Myanmar Peace Support Initiative, 2014). Myanmar lebih memilih Norwegia untuk membantu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan konflik etnik dibandingkan dengan negara tetangganya, yaitu Tiongkok dan India karena hubungan dan bantuan Norwegia dengan Myanmar saat itu sangat menonjol dibandingkan dengan India dan Tiongkok. Bantuan Tiongkok kepada Myanmar saat terjadinya pergerakan demokrasi lebih cenderung membantu dalam bidang militer. Sedangkan India hubungannya dengan Myanmar sering mengalami perubahan.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui alasan dari mengapa Myanmar memilih Norwegia untuk membantu dalam menyelesaikan konflik yang ada di Myanmar dibandingkan dengan negara tetangga Myanmar, yaitu Tiongkok dan India. Untuk menganalisis alasan Myanmar lebih memilih Norwegia yang secara geografis letaknya jauh, penulis menggunakan teori *rational choice* terutama menggunakan pendekatan *rational actor* atau rasional aktor serta menggunakan konsep kepentingan nasional. Pembahasan yang penulis angkat dalam penelitian ini berangkat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang banyak membahas topik ini dengan bahasan mengenai kebijakan Norwegia yang bersifat konstruktif terhadap Myanmar dan perubahan kebijakan Norwegia dalam keterlibatannya terkait proses perdamaian. Selain itu, penelitian ini juga berangkat dari laporan yang

dikeluarkan oleh Myanmar Peace Support Initiative itu sendiri mengenai keefektifitasan dan hal-hal yang dapat dijadikan pelajaran selama MPSI berjalan selama dua tahun, yaitu 2012-2014.

Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan teori *rational choice* milik Graham T. Allison. Menurut Graham T. Allison, konsep dari teori *rational choice* harus mengandung empat unsur. Unsur yang pertama adalah aktor nasional. Aktor nasional sebagai aktor yang bersifat rasional yang berperan dalam mengambil suatu kebijakan dan aktor tersebut harus memiliki suatu tujuan, pilihan, dan perkiraan dari konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul dari beberapa pilihan tersebut dan salah satu contoh dari aktor nasional adalah pemerintah atau negara (Allison, 1963). Unsur yang kedua adalah masalah. Dalam pilihan rasional yang diambil oleh suatu aktor tersebut dilakukan untuk menghadapi masalah yang sedang dialami oleh suatu negara (Allison, 1963). Unsur yang ketiga adalah pilihan statis. Pilihan statis ini adalah pilihan yang ditujukan pada beberapa kegiatan perwakilan pemerintah yang relevan terhadap masalah yang sedang dihadapi merupakan apa yang telah dipilih oleh bangsa sebagai solusinya (Allison, 1963). Unsur yang terakhir adalah tindakan sebagai pilihan rasional.

Dalam unsur tindakan sebagai pilihan rasional terdapat beberapa komponen, yaitu tujuan dan sasaran, *options*, konsekuensi, dan *choice*. Tujuan dan sasaran adalah tujuan yang akan dicapai dengan diambilnya suatu kebijakan oleh suatu aktor dan biasanya tujuan dan sasaran ini mencakup keamanan nasional dan kepentingan nasional dari suatu negara (Allison, 1963). *Options* merupakan berbagai tindakan yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi suatu negara yang menyediakan berbagai pilihan (Allison, 1963). Konsekuensi merupakan perkiraan-perkiraan yang akan timbul dari berbagai pilihan yang ada dan konsekuensi ini digunakan untuk melihat untung dan rugi yang menyangkut tujuan dan sasaran awal suatu negara (Allison, 1963). *Choice* merupakan pilihan rasional yang diambil oleh aktor rasional yang memaksimalkan nilai dan aktor rasional akan memilih pilihan yang konsekuensinya memberi keuntungan pada aktor tersebut yang sejalan dengan tujuan dan sasaran awalnya (Allison, 1963).

Selain menggunakan teori *rational choice*, penulis juga menggunakan konsep kepentingan nasional milik Frankel. Frankel mendefinisikan kepentingan nasional menjadi dua level, yaitu level aspirasional dan level operasional. Pada level aspirasional, pengertian dari kepentingan nasional adalah visi untuk mendapatkan kehidupan yang baik merupakan tujuan yang ideal bagi suatu negara (Frankel, 1969). Sedangkan pada level operasional, pengertian dari kepentingan nasional itu sendiri adalah jumlah dari kepentingan-kepentingan dan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya ingin dicapai oleh suatu negara (Frankel, 1969). Perbedaan dari kedua level adalah level aspirasional bersifat jangka panjang yang berakar pada sejarah dan ideologi (Frankel, 1969).

PEMBAHASAN

Rasionalisasi Myanmar

Untuk menganalisis rasionalisasi Myanmar memilih Norwegia, penulis memiliki parameter sebagai berikut; (1) Myanmar bertindak sebagai aktor nasional yang bertindak secara rasional, yang dibuktikan dengan Myanmar adalah negara yang merdeka yang mana mempunyai pemerintah yang berdaulat untuk mengambil suatu kebijakan rasional. (2) Myanmar memiliki permasalahan konflik etnik yang masih berlangsung meskipun Pemerintah Myanmar telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang mana Pemerintah Myanmar memiliki permasalahan 11 konflik etnik berdasarkan Uppsala Conflict Data Program. (3) Myanmar telah melakukan upaya NCA untuk mengatasi permasalahan konflik etnik yang masih berlangsung, NCA ini diambil oleh pemerintah sebagai solusi untuk

mencapai kepentingan nasional Myanmar. Namun NCA ini tidak begitu efektif karena masih terlibat kekerasan diberbagai konflik seperti yang dijelaskan oleh penulis pada bagian pendahuluan. (4) Myanmar mengambil pilihan rasional dengan meminta bantuan Norwegia untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan konflik etnik yang masih berlangsung dengan mempertimbangkan *track record* perlakuan Norwegia terhadap Myanmar.

Track record yang dipertimbangkan oleh Myanmar adalah Norwegia merupakan salah satu negara yang sangat mendukung sistem demokrasi untuk diterapkan dan Norwegia juga memberi dukungan kepada Myanmar untuk menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis yang mana didalamnya lebih menghargai hak-hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berekspresi serta berpendapat. Dukungan Norwegia ini dapat dilihat dari kebijakan sanksi yang diberikan oleh Norwegia terhadap Myanmar. Kebijakan sanksi tersebut dijadikan sebagai alat untuk mendesak Myanmar agar segera menerapkan pemerintahan yang demokratis dan menghilangkan rezim militernya. Meskipun Norwegia memiliki kebijakan sanksi kepada Myanmar tetapi partai pemenang pemilu pertama di Myanmar, Norwegia tetap memberikan beberapa bantuan kepada Myanmar (Olsen, 2016).

Terdapat dua bantuan Norwegia yang membuat *image* serta posisi Norwegia semakin kuat di mata Myanmar dan Internasional, yaitu pembentukan Democratic Voice Burma dan Aung San Suu Kyi sebagai Nobel Peace Prize (Olsen, 2016). Democratic Voice Burma adalah *non-profit* organisasi media yang didirikan oleh Norwegia dan bertempat di Oslo, Norwegia (Democratic Voice Burma, n.d.). Democratic Voice Burma media ini dibentuk oleh pemerintah Norwegia pada Juli 1992 dan media ini dibentuk atas respon keterbatasan media dan *press* di Myanmar pada saat itu dan Democratic Voice Burma ini adalah media yang menyiarkan berita-berita tanpa ada bagian yang disensor maupun dipotong seperti yang biasa dilakukan oleh rezim militer junta pada dunia media di Myanmar saat itu (Corsette, 1992). Democratic Voice Burma ini dijalankan oleh warga Myanmar yang ada di Oslo yang mana berita-beritanya didapatkan dari pengambilan berita secara diam-diam dari dalam Myanmar yang dilakukan oleh *undercover journalist* (Olsen, 2016).

Democratic Voice Burma ini adalah media radio yang mempunyai empat misi, yaitu untuk memberikan berita yang akurat dan tidak bias kepada masyarakat Myanmar, untuk meningkatkan pemahaman dan kerja sama diantara berbagai kelompok etnis dan agama di Myanmar, untuk mendorong dan mempertahankan opini publik yang independent dan memungkinkan debat politik dan social, dan untuk menanamkan cita-cita demokrasi dan hak asasi manusia kepada seluruh rakyat Myanmar (Democratic Voice Burma, n.d.). Pembentukan Democratic Voice Burma ini merupakan salah satu upaya pemerintah Norwegia untuk membantu Myanmar mengubah dan menerapkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan resmi Sekretaris Menteri Luar Negeri Norwegia periode 1990-1997, Jan Egeland, sebagai berikut: "*The Norwegian Government has decided that we would do whatever we could and intensively as we can to help the democratic organizations of Burma.*" (Corsette, 1992).

Bantuan Norwegia yang kedua yang membuat posisi Norwegia mencolok dan kuat di mata Myanmar adalah Norwegia merupakan pihak yang membantu Aung San Suu Kyi mendapatkan gelar Nobel Peace Prize (Olsen, 2016). Norwegia dapat terlibat dalam menangnya Aung San Suu Kyi atas gelar Nobel Peace Prize ini dikarenakan adanya Hallvard Kåre Kuløy (Olsen, 2016). Rasionalisasi Myanmar yang kedua adalah Norwegia melalui Hallvard Kuløy mendorong dan membantu Aung San Suu Kyi mendapatkan Nobel Peace Prize. Hallvard Kuløy adalah salah satu teman Aung San Suu Kyi saat Aung San Suu Kyi beserta suaminya tinggal di Kathmandu, Nepal pada awal tahun 1970an (Bryne, 2000). Pada saat itu Hallvard Kuløy merupakan direktur UNICEF di Nepal periode 1972-1978 dan kemudian pada tahun 1980 Hallvard Kuløy pindah tugas menjadi direktur UNICEF di Myanmar (Olsen, 2016).

Awal mula dari gelar *Nobel Peace Prize* yang didapat oleh Aung San Suu Kyi adalah Dr Kyaw Than, perwakilan pengasingan Pemerintah Myanmar, yang berada di Frankfurt meminta tolong kepada Jan Ramstad untuk membantu mendapatkan perhatian internasional ke Myanmar karena pada saat itu perhatian internasional berfokus pada pemimpin ceko yang bernama Václav Havel (Mon, 2012). Setelah mendapatkan informasi bahwa Dr. Kyaw Than beserta kerabatnya membutuhkan bantuan Jan Ramstad langsung bertolak ke Frankfurt untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Sesampainya di Frankfurt Jan Ramstad merasakan kefrustrasian dari Dr Kyaw Than beserta kerabat-kerabatnya karena rencana mereka yang menginginkan Myanmar mendapatkan perhatian internasional namun rencana tersebut gagal dikarenakan kebebasan pers saat itu dibatasi (Mon, 2012). Saat Jan Ramstad beserta orang-orang dari pengasingan pemerintah Myanmar melakukan diskusi pertanyaan yang keluar dari semua peserta dalam diskusi tersebut adalah apa yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan perhatian internasional beralih ke Myanmar? (Mon, 2012). Kemudian Jan Ramstad serta Dr. Sein Wein mencetuskan untuk membuat Aung San Suu Kyi mendapatkan gelar *Nobel Peace Prize* untuk mendapatkan perhatian internasional (Mon, 2012).

Setelah berhasil memenangkan Aung San Suu Kyi dengan gelar Nobel Peace Prize, Norwegia semakin gencar dan intensif dalam membantu Myanmar menuju negara yang demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah Norwegia yang mendorong Hallvard Kuløy untuk membentuk Burma Council (Samarbeidsutvalfet for Burma) (Olsen, 2016). Burma Council dibentuk sebagai The Norwegian Burma Council yang diinisiasi oleh sekelompok orang-orang Norwegia dan Kementrian Luar Negeri Norwegia pada 2 Januari 1992 yang dibentuk dengan mandat untuk memfasilitasi dan menyalurkan bantuan kemanusiaan serta politik Norwegia untuk pergerakan demokrasi Myanmar (Norwegian Burma Committee, n.d.).

Norwegian Burma Committee adalah sebuah LSM Norwegia yang hanya bekerjasama dengan Myanmar dan Norwegian Burma Committee ini mempunyai fokus pada informasi dan advokasi di Norwegia dan pembangunan di Myanmar (Norwegian Burma Committee, n.d.). Norwegian Burma Committee memiliki tujuan untuk mengembangkan masyarakat sipil yang kuat, demokratis dan terorganisasi dengan baik yang dapat menjadi kekuatan pendorong untuk perubahan di Myanmar serta dapat memainkan peran aktif ketika perubahan mulai terjadi (Norwegian Burma Committee, n.d.). Tujuan dari tugas dan kerja Norwegian Burma Committee adalah untuk mencapai Myanmar yang demokratis yang mana hak asasi manusia dihormati dan setiap orang memiliki hak dan akses yang sama untuk berpartisipasi dan membuat keputusan terlepas dari jenis kelamin, orientasi seksual, kelas, etnis atau agama (Norwegian Burma Committee, n.d.).

Tujuan dan sasaran dari kebijakan Myanmar ini adalah untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan konflik etnik yang ada sejak lama dan masih berlangsung hingga sekarang serta menciptakan perdamaian di seluruh wilayah Myanmar. Sementara itu sasaran dari kebijakan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat yang terkena dampak konflik sehingga harus pergi mengungsi meninggalkan tempat tinggalnya. Karena salah satu kepentingan nasional suatu negara adalah melindungi dan menciptakan keamanan bagi seluruh warga negaranya seperti yang diungkapkan oleh Jackson dan Sorensen dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* dan hal tersebut sesuai dengan definisi kepentingan nasional milik Frankel level operasional. Dengan demikian tujuan dan sasaran atas kebijakan Myanmar tersebut adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga negaranya dengan mengatasi dan menyelesaikan permasalahan konflik etnik yang masih berlangsung hingga saat ini.

Komponen yang kedua adalah *options*. Myanmar telah melakukan pilihan pertamanya untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan konflik etnik yaitu dengan cara melakukan NCA dengan seluruh kelompok etnik yang terlibat dalam konflik. Namun dengan tindakan tersebut tujuan dan sasaran dari pemerintah Myanmar belum dapat tercapai karena

masih terdapat kekerasan dan pelanggaran HAM diberbagai wilayah konflik yang mengakibatkan sejumlah masyarakat setempat pergi mengungsi untuk mendapatkan tempat yang lebih aman. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa kekerasan di beberapa wilayah konflik pada tahun 2019. Pada Januari 2019 lebih tepatnya tanggal 5 dan 13 Januari terjadi pertikaian antara militer Myanmar dengan KNLA Brigade 5 di wilayah Ler Doh Htee, Kayin State (Zar, 2019). Menurut perwakilan KNLA Brigade 5, Saw Kler Doh, pertikaian tersebut disebabkan oleh militer Myanmar telah melanggar perjanjiannya dengan masuk ke dalam teritori yang dilarang untuk dimasuki oleh militer Myanmar (Zar, 2019). Pada 21 maret 2019 kembali terjadi pertikaian kekerasan namun kekerasan ini terjadi di Rakhine State dan pertikaian tersebut terjadi di Kota Buthidaung yang terletak di bagian utara Rakhine State. Pertikaian ini disebabkan oleh gagalnya pertemuan antara militer Arakan dengan pemerintah Myanmar untuk menghasilkan solusi menyelesaikan peningkatan krisis yang ada di Rakhine State (The Jakarta Post, 2019). Dengan adanya beberapa kekerasan yang terjadi setelah dilakukannya NCA antara pemerintah Myanmar dengan seluruh kelompok etnik yang terlibat dalam etnik konflik tersebut mengakibatkan pemerintah Myanmar mengambil kebijakan lainnya untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan konflik etnik dengan maksimal. Pilihan yang dimiliki pemerintah Myanmar adalah dengan meminta bantuan negara lain. Negara yang menjadi pilihan yang dimiliki oleh Myanmar antara lain adalah India, Tiongkok, dan Norwegia.

Untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan tersebut pemerintah Myanmar melihat konsekuensi-konsekuensi dari masing-masing pilihan yang dimiliki oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar melihat perkiraan konsekuensi dari beberapa pilihan tersebut dari *track record* perlakuan negara-negara tersebut terhadap Myanmar saat adanya pergerakan demokrasi di Myanmar pada tahun 1990an. Dapat kita lihat *track record* Tiongkok dengan Myanmar pada saat terjadinya pergerakan demokrasi di Myanmar, hubungan antara Tiongkok dengan Myanmar lebih banyak dalam bidang militer yang meliputi jual beli persenjataan dan pelatihan anggota militer Myanmar oleh Tiongkok. Hal ini dapat kita lihat setelah tahun 1988 hubungan Myanmar dengan Tiongkok terlihat lebih dekat dalam bidang militer. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Myanmar membeli beberapa senjata seperti pesawat tempur, *tanks*, kapal angkatan laut, dan sebagainya kepada Tiongkok pada tahun 1989, selain itu menyangkut persenjataan Myanmar Tiongkok juga menawarkan mengenai pinjaman dan kredit gratis kepada militer junta (Shee, 2002). Dari *track record* tersebut pemerintah Myanmar melihat konsekuensi jika memilih Tiongkok dalam menyelesaikan permasalahan konflik etnik akan cenderung mendatangkan kerugian bagi Myanmar. Karena Tiongkok lebih banyak membantu dalam bidang militer dan jika Myanmar memilih Tiongkok yang ada permasalahan konflik etnik di Myanmar akan semakin meningkatkan jumlah kekerasan yang akan terjadi karena kekerasan dalam masalah etnik konflik dapat meningkatkan intensitas konflik yang ada.

Sementara itu pilihan yang kedua yang dimiliki Myanmar adalah meminta bantuan kepada India yang berbatasan langsung di bagian Barat Daya. *Track record* hubungan antara India dengan Myanmar mengalami berbagai dinamika. Pada tahun 1962 hubungan antara Myanmar dengan India mengalami ketegangan yang disebabkan oleh kebijakan *Burmese way to Socialism* yang menyinggung orang India yang tinggal di Myanmar dan posisi netral Myanmar pada saat terjadi *Chinese attack* pada India yang mana India menginterpretasikan posisi netral Myanmar tersebut adalah sikap pro terhadap Tiongkok (Singh, 2007). Selain itu, hubungan antara India dengan Myanmar sempat terputus ditahun 1988 saat terjadi kudeta di Myanmar dikarenakan pada saat itu India mengeluarkan kebijakan boikot terhadap militer junta yang saat itu menjadi pemimpin dan penguasa di Myanmar (Shekhar, 2016). Pada tahun 1990 hubungan antara Myanmar dengan India kembali mengalami perubahan yang buruk dan dapat dibidang hubungan kedua negara tersebut berada diposisi terendah yang dikarenakan oleh kedua negara tersebut saling melemparkan tuduhan satu sama lain (Shekhar, 2016).

Dengan demikian pemerintah Myanmar memiliki perkiraan konsekuensi-konsekuensi untuk mempertimbangkan India dalam membantu menyelesaikan permasalahan konflik etnik. Hubungan Myanmar dan India yang sangat fluktuatif tersebut menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang cenderung tidak menguntungkan bagi Myanmar karena India beberapa kali dalam sejarah hubungannya dengan Myanmar mengubah posisi serta kebijakannya terhadap Myanmar. Sikap India yang seringkali berubah-ubah pada sejarah hubungan antara India dengan Myanmar ini kemungkinan dapat terjadi lagi di masa yang akan datang dan jika Pemerintah Myanmar memilih India untuk membantu dalam menghadapi permasalahan konflik etnik tidak akan maksimal dikarenakan oleh kebijakan serta posisi India yang berubah-ubah.

Pilihan ketiga yang dimiliki oleh Pemerintah Myanmar adalah meminta bantuan kepada Pemerintah Norwegia. Seperti yang sudah dijelaskan di atas Norwegia memiliki berbagai hubungan keterlibatan dengan Myanmar di bidang politik dibandingkan dengan dua negara tetangganya. Selain itu, salah satu tokoh penting Myanmar yaitu Aung San Suu Kyi memiliki teman dekat yang berasal dari Norwegia. Maka konsekuensi yang akan diterima oleh Myanmar jika memilih Norwegia cenderung positif karena bantuan Norwegia kepada Myanmar cenderung bersifat politik yang mana juga mendukung kepentingan nasional Myanmar. Maka komponen yang terakhir adalah *choice* atau pilihan rasional yang diambil oleh Myanmar adalah dengan memilih Norwegia dibandingkan Tiongkok dan India karena berdasarkan konsekuensinya pilihan Norwegia yang paling banyak mendatangkan keuntungan bagi Myanmar.

Bantuan Norwegia Melalui MPSI

Norwegia dalam memberikan bantuan kepada Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan konflik etnik memiliki berbagai macam bantuan. Namun di dalam penelitian ini penulis hanya akan menjelaskan bantuan Norwegia melalui MPSI kepada konflik Kayin, Kayah, dan Rakhine yang berbentuk *peace consultation*. Pada Konflik Kayin Norwegia membetrakan dana sebanyak 13,329 USD untuk mengadakan Karen Consultation Process sebanyak tiga tahap (The Myanmar Peace Support Initiative, 2014). Diskusi pertama berlangsung pada Februari 2013 dan bertempat di Bago dengan jumlah peserta sebanyak 34 peserta yang terdiri dari Distrik KNU 1,2 dan 3 serta perwakilan dari Pemerintahan wilayah Bago juga datang pada diskusi pertama ini dan topik yang dibicarakan adalah keinginan masyarakat akan perdamaian serta suara masyarakat mengenai “*can we trust the ceasefire?*” (The Myanmar Peace Support Initiative, 2014). Diskusi yang kedua dilaksanakan pada Mei 2013 dan bertempat di Pa’an yang mana pada sesi diskusi dan konsultasi serta *information sharing* antara KNU, CIDKP, serta perwakilan-perwakilan kelompok dan komunitas tidak dapat terselesaikan dikarenakan adanya Pemerintah Myanmar di dalam diskusi tersebut sehingga berakhir pada sesi diskusi ketiga. Sesi diskusi yang terakhir dari proyek *Karen Consultation Process* ini dilaksanakan pada Juni 2013 dan bertempat pada kantor utama KNU yang mana terdapat 33 peserta yang hadir dalam diskusi tersebut. Pada diskusi yang ketiga ini topik yang dibicarakan adalah mengenai *land-grabbing* yang ada di wilayah Kayin. Seluruh peserta menyetujui bahwa permasalahan *land-grabbing* ini dapat diselesaikan melalui pegimplementasian hukum adat dengan dukungan politik dari KNU (The Myanmar Peace Support Initiative, 2014).

Norwegia juga memberikan bantuan kepada Konflik Kayah melalui MPSI yang membentuk proyek yang berupa Karenni National Progressive Party (KNPP) *Consultation Process* yang juga terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama dari KNPP *Consultation Process* ini dilaksanakan pada September 2012 dan bertempat di Mae Hong Son yang membicarakan mengenai keperluan-keperluan serta pilihan-pilihan komunitas untuk mekanisme pengawasan perjanjian gencatan senjata antara KNPP dengan Pemerintah Myanmar (The Myanmar Peace

Support Initiative, 2014). Selain itu, proyek ini juga berkontribusi terhadap peningkatan dan penguatan *networks* didalam kelompok atau komunitas Karenni yang berbeda-beda (Lidauer, 2014). Tahap kedua dilakukan pada Januari 2013 yang mempunyai tujuan untuk memberitahukan kepada public mengenai perjanjian gencatan senjata, memberitahukan kepada publik mengenai perkembangan rencana dan politik dari KNPP, untuk mendorong para masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan pengawasan local dan komite hak asasi manusia (The Myanmar Peace Support Initiative, 2014). Tahap ketiga dari KNPP *Consultation Process* ini dilaksanakan pada November 2013 yang mana pada tahap ketiga ini membicarakan mengenai keinginan KNPP yang ingin menambahkan konsultasi publik di tiga kota utama dan 20 desa. Selain itu pada tahap tiga juga menyediakan sesi *Training-of-Trainers* serta meningkatkan kesadaran masyarakat Karenni untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses perdamaian dan melindungi hak-hak asasi manusia mereka (The Myanmar Peace Support Initiative, 2014).

MPSI juga memberikan bantuan kepada konflik Rakhine dengan membentuk suatu proyek yang bernama *ALP Capacity Support*. *ALP Capacity Support* ini merupakan proyek yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas dari ALP dalam keterlibatannya di proses perdamaian. Untuk mencapai tujuannya tersebut Norwegia memberikan dana sebanyak 30,000 USD untuk melaksanakan proyek ini sebanyak dua kali. Proyek yang pertama adalah proyek untuk memfasilitasi pertemuan dan diskusi strategi internal ALP yang dilaksanakan di India. Sedangkan proyek yang kedua adalah proyek perjalanan bagi ALP untuk melakukan pengawasan proses perdamaian di Filipina (Myanmar Peace Monitor, n.d.).

KESIMPULAN

Jawaban atas alasan Myanmar lebih memilih Norwegia terdapat tiga faktor, faktor yang pertama adalah pembentukan Democratic Voice Burma oleh Norwegia yang menyediakan segala macam informasi tanpa dipotong dan sensor pada saat itu yang mana pemerintah militer junta sangat membatasi kebebasan media dan pers di Myanmar. Faktor yang kedua adalah Norwegia mencabut sanksi ekonominya pada Myanmar yang mana hal tersebut memberi keuntungan bagi Myanmar karena dapat menambah pendapatan ekonominya. Faktor yang ketiga adalah Aung San Suu Kyi mempunyai teman dekat yang berasal dari Norwegia bernama Hallvard Kuløy. Hallvard Kuløy ini sangat berperan penting dalam membantu mendapatkan gelar *Nobel Peace Prize* yang didapat oleh Aung San Suu Kyi dan selain Hallvard Kuløy ini ada aktor lain yang terlibat dalam gelar yang didapat oleh Aung Sann Suu Kyi, yaitu Jan Ramstad. Selain itu, cara Norwegia membantu Myanmar dengan cara memberikan bantuan kemanusiaan serta bantuan keuangan untuk melaksanakan dialog anantara tokoh-tokoh etnik dengan Pemerintah Myanmar. Karena pendekatan Norwegia dalam membantu menghadapi dan mengatasi permasalahan konflik etnik di Myanmar adalah dialog.

REFERENSI

- Allison, G. T. (1963). Conceptual Models and The Cuban Missiles Crisis. *63* (3), 689-718.
- Allison, G. T. (1963). Conceptual Models and The Cuban Missiles Crisis. *63* (3), 689-718.
- Bryne, A. (2000). *Brenner for Burma*. Retrieved May 29, 2019, from <https://www.dagbladet.no/nyheter/brenner-for-burma/65643946>
- Burma Link. (2014). *Overview of Ethnic Conflict*. Retrieved from Burma Link: <https://www.burmalink.org/background/burma/dynamics-of-ethnic-conflict/overview/>
- Cole, R. (2017). *Country Profile: Myanmar*. Harvard Divinity School.

- Corsette, B. (1992). *Burmese Oppositions Gets Oslo Radio Service*. Retrieved May 22, 2019, from <https://www.nytimes.com/1992/07/19/world/burmese-opposition-gets-oslo-radio-service.html>
- Democratic Voice Burma. (n.d.). *About: Democratic Voice Burma*. Retrieved May 22, 2019, from <http://english.dvb.no/about>
- Frankel, J. (1969). National Interest: A Vindication. *24* (4), 717-725.
- Gottschlich, P. (2017). The India-Myanmar Relationship: New Directions after a Change of Governments? *IQAS*, *48* (3-4), 171-202.
- Holmes, R. A. (1967). Burmese Domestic Policy: The Politics of Burmanization. *7* (3), 188-197.
- Institute for Security & Development Policy. (2015). *Myanmar's Nationwide Ceasefire Agreement*. Institute for Security & Development Policy.
- Karen News. (2018). *Nationwide Ceasefire Agreement: Burma Army Attacks on Karen Villagers, Displacing 340 Villagers-Clear Violation of NCA*. Retrieved July 25, 2019, from <http://karennews.org/2018/10/nca-burma-army-attacks-on-karen-villagers-displacing-340-villagers-clear-violation-of-nca/>
- Karen News. (2018). *Nationwide Ceasefire Agreement: Burma Army Attacks on Karen Villagers, Displacing 340 Villagers-Clear Violation of NCA*. Retrieved from Karen News: <https://www.burmalink.org/background/burma/dynamics-of-ethnic-conflict/overview/>
- Lidauer, C. J. (2014). *Testing Ceasefires, Building Trust: Myanmar Peace Support Initiative Operational Review*. Norwegian Ministry of Foreign Affairs.
- Mon, S. T. (2012). *Slik fikk Aung San Suu Kyi fredsprisnominasjonen*. Retrieved May 17, 2019, from <https://www.nrk.no/nobel/kreftene-bak-suu-kyis-nominasjon-1.8204171>
- Myanmar Peace Monitor. (n.d.). *Myanmar Peace Support Initiative (MPSI)*. Retrieved June 13, 2019, from <http://www.mmpeacemonitor.org/1444>
- Norwegian Burma Committee. (n.d.). *The Norwegian Burma Committee*. Retrieved May 29, 2019, from <http://www.burma.no/English/index.html>
- Olsen, B. M. (2016). *Norway's Constructive Engagement in Myanmar: A Small State as Norm Entrepreneur*. Oslo: Norwegian University of Life Sciences.
- Shee, P. K. (2002). The Political Economy of China-Myanmar Relations: Strategic and Economic Dimensions. *Ritsumeikan Annual Review of International Studies*, *1*, 33-53.
- Shekhar, V. (2016). India's 'Engagement Myanmar' Discourses: A Political Economy Approach. In L. Ghosh (Ed.), *India-Myanmar Relations: Historical Links to Contemporary Convergences* (p. 103). New Delhi: Paragon International Publishers.
- Singh, Y. (2007). *India's Myanmar Policy: A Dilemma between Realism and Idealism*. New Delhi: Institute of Peace and Conflict Studies.
- Smith, M. (1994). *Ethnic Groups in Burma: Development, Democracy and Human Rights*. 1994: Anti-Slavery International.
- The Jakarta Post. (2019). *Six Killed in Myanmar's Rakhine State as Army Battles Rebels*. Retrieved July 11, 2019, from <https://www.thejakartapost.com/amp/seasia/2019/03/22/six-killed-in-myanmars-rakhine-state-as-army-battles-rebels.html>
- The Myanmar Peace Support Initiative. (2014). *Lesson Learned from MPSI's Work Supporting the Peace Process in Myanmar*. Yangon: The Myanmar PEace Support Initiative.

- The Myanmar Peace Support Initiative. (2014). *Lessons Learned from MPSI's Work Supporting the Peace Process in Myanmar: March 2012 to March 2014*. Yangon: Myanmar Peace Support Initiative.
- Zar, N. W. (2019). *The New Year Starts With Armed Conflict between Karen and Burma Armies in Northern Karen State*. Retrieved July 11, 2019, from <http://karennews.org/2019/01/the-new-year-starts-with-armed-conflict-between-karen-and-burma-armies-in-northern-karen-state/>